

Sejarah Kerajaan Amanuban di Bawah Kepemimpinan Raja Kusa Nope Tahun 1950-1958

Vento Ketman Alian Taneo^{1*}, Malkisedek Tane², Sarlota Naema Sipa³

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

^{2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : ventotaneo29a@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 1142-1150

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2490>

Article History:

Received: April 20, 2026

Revised: Mei 10, 2026

Accepted: Mei 20, 2026

Abstract: *This study examines the history of the Amanuban Kingdom under the leadership of King Kusa Nope during the period 1950–1958, a transitional era from the colonial system to the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research focuses on the background of Kusa Nope's appointment as king and his strategies for maintaining the legitimacy of traditional authority amid governmental modernization. The study employs a historical method with a qualitative approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary data were obtained through interviews with descendants of the royal family and field observations at historical sites in Niki-Niki and Tunbes. Secondary sources include colonial archives, royal genealogies, and academic studies related to Amanuban. The findings reveal that Kusa Nope was appointed as acting king on July 14, 1949, replacing Paulus Nope, who was ill. His modern education in Makassar became the foundation of the "Diplomatic Adaptation of Traditional Elites" strategy in maintaining royal influence. This strategy included accepting the status of Regional Swapraja Head, utilizing modern education for rational legitimacy, building national political networks, and granting royal lands for modern administrative integration. In conclusion, Kusa Nope successfully combined traditional, charismatic, and legal-rational authority, enabling the Amanuban Kingdom to preserve its influence until the abolition of the swapraja system in 1962.*

Keywords: *Amanuban Kingdom, Kusa Nope, Traditional Leadership, Independence Transition, Adaptation Strategy*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji sejarah Kerajaan Amanuban di bawah kepemimpinan Raja Kusa Nope pada periode 1950–1958, masa transisi dari sistem kolonial menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus penelitian meliputi latar belakang pengangkatan Kusa Nope sebagai raja dan strategi mempertahankan legitimasi kekuasaan tradisional di tengah modernisasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan keturunan keluarga kerajaan dan observasi di situs historis Niki-Niki serta Tunbes. Sumber sekunder berasal dari arsip kolonial, silsilah keluarga kerajaan, dan kajian akademik terkait Amanuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kusa Nope diangkat sebagai pemangku raja pada 14 Juli

1949 menggantikan Paulus Nope yang sakit. Pendidikan modern yang diperolehnya di Makassar menjadi dasar strategi “Adaptasi Diplomatis Elit Tradisional” dalam mempertahankan pengaruh kerajaan. Strategi tersebut mencakup penerimaan status Kepala Daerah Swapraja, pemanfaatan pendidikan modern untuk legitimasi rasional, pembangunan jejaring politik nasional, serta penghibahan tanah kerajaan bagi integrasi administrasi modern. Kesimpulannya, Kusa Nope berhasil memadukan otoritas tradisional, kharismatik, dan legal-rasional sehingga pengaruh Kerajaan Amanuban tetap bertahan hingga penghapusan sistem swapraja tahun 1962.

Kata Kunci: Kerajaan Amanuban, Kusa Nope, Kepemimpinan Tradisional, Transisi Kemerdekaan, Strategi Adaptasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bekas jajahan Hindia Belanda yang mengalami periode penjajahan selama lebih dari tiga setengah abad. Masa kolonial ini meninggalkan jejak mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di wilayah Timor yang menjadi bagian dari struktur administratif *Gouvernement Grote Oost* sejak awal abad ke-20. Meskipun telah merdeka sejak tahun 1945, warisan kolonial seperti sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) dan stratifikasi sosial masih membentuk pola relasi kuasa di berbagai daerah, termasuk di Kerajaan Amanuban, hingga periode awal kemerdekaan (Ricklefs, 2008; Vickers, 2013).

Menurut Fox dalam Schulte Nordholt (1996), status Pulau Timor dalam kerangka kolonial Hindia Belanda secara administratif tercakup dalam struktur "Timor Onder Hollandsche Hindia", yang menandakan posisinya sebagai wilayah dependensi dengan pemerintahan tidak langsung. Dalam konstelasi politik ini, kekuasaan teritorial di bagian barat pulau tidak dijalankan secara sentralistik oleh birokrasi Belanda, melainkan melalui jaringan kerajaan-kerajaan lokal (*zelfbestuuren*) yang diakui dan diawasi, di mana Kerajaan Amanuban menempati posisi geopolitik yang strategis. Sebagai salah satu *vorstenlanden* (negeri berpenguasa) utama di Timor Barat, Kerajaan Amanuban pada periode kolonial beroperasi dalam sebuah paradoks: di satu sisi, ia tetap mempertahankan otonomi internal yang signifikan dalam mengatur struktur sosial tradisional, sistem pertanahan, dan hierarki adat di bawah kepemimpinan *usif* (raja); namun di sisi lain, otoritasnya dibatasi dan diarahkan oleh kebijakan *onthoudingspolitiek* (politik menahan diri) Belanda, yang menjadikan kerajaan ini sebagai unit pengumpul pajak dan penjaga stabilitas untuk kepentingan administratif dan ekonomi kolonial.

Periode awal 1950-an di Indonesia ditandai oleh upaya untuk menyusun ulang struktur pemerintahan pasca-kolonial, dari sistem Hindia Belanda menuju bentuk negara kesatuan dengan pembagian administrasi yang lebih modern dan formal (Booth, 2015; Feith, 1958). Pemilihan waktu 1950-1958 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan periodisasi yang signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tahun 1950 dipilih sebagai titik awal karena merupakan masa transisi penting ketika Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan pasca Republik Indonesia Serikat (RIS), yang secara langsung memengaruhi status kerajaan-kerajaan swapraja termasuk Amanuban (UU No. 44/1950). Adapun tahun 1958 menjadi batas akhir karena menandai implementasi kebijakan penghapusan status swapraja melalui UU No. 1/1957 dan UU No. 69/1958 yang mengintegrasikan kerajaan tradisional ke dalam sistem pemerintahan daerah yang seragam. Rentang delapan tahun ini merupakan periode kritis yang memungkinkan analisis mendalam terhadap strategi adaptasi dan negosiasi politik Kusa Nope dalam mempertahankan legitimasi tradisional di tengah tekanan modernisasi negara (Kuntowijoyo, 2013).

Kusa Nope, sebagai penguasa terakhir Kerajaan Amanuban yang diakui secara formal sebelum penghapusan sistem swapraja, mengembangkan sebuah model diplomasi kultural yang adaptif terhadap tuntutan zaman serta pendekatan kepemimpinan yang transformasional. Berdasarkan teori kepemimpinan transformasional dari Burns (2010), pemimpin transformasional

memiliki kemampuan untuk membawa perubahan melalui *idealized influence* (pengaruh ideal), *inspirational motivation* (motivasi inspiratif), *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual), dan *individualized consideration* (perhatian individual). Keunggulan Kusa Nope sebagai pemimpin tidak hanya terletak pada kapasitas intelektual dan wawasan kebangsaannya yang luas, tetapi juga pada kemampuannya mengombinasikan tiga bentuk otoritas secara simultan: otoritas tradisional sebagai pewaris sah tahta kerajaan, otoritas karismatik yang tercermin dari kepribadiannya yang bijaksana dan disegani, serta otoritas legal-rasional yang dibuktikan melalui partisipasinya sebagai anggota Konstituante dan penggagas pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Weber, 1978).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis latar belakang diangkatnya Kusa Nope sebagai Raja Kerajaan Amanuban pada periode 1950-1958, dan (2) mendeskripsikan strategi Raja Kusa Nope dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan tradisional di tengah proses transisi menuju sistem pemerintahan modern pasca kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian sejarah lokal Nusa Tenggara Timur serta memperkaya historiografi tentang transformasi kekuasaan tradisional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan mencakup empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013; Sjamsuddin, 2007).

Penelitian dilaksanakan di bekas wilayah inti Kerajaan Amanuban yang secara administratif saat ini termasuk dalam Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi difokuskan pada dua wilayah strategis. Pertama, Kelurahan Niki-Niki yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Amanuban sejak masa Raja Pae Nope (1920-1946) dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Kusa Nope (1949-1962). Di kelurahan ini terdapat kompleks *Sonaf* (Istana) Kerajaan yang dibangun pada masa Raja Pae Nope sekitar tahun 1930-an, makam para raja termasuk makam Raja Kusa Nope, serta dokumen dan arsip kerajaan yang masih tersimpan di kalangan keluarga bangsawan. Kedua, Desa Tunbes yang merupakan situs keramat (*Ie'u*) Kerajaan Amanuban, di mana terdapat makam empat raja pertama Dinasti Nope sebagai penanda kontinuitas kepemimpinan.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (Katulski, 2024) dengan informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Informan utama pertama adalah Pina Ope Nope (46 tahun, cucu dari istri kedua Raja Pae Nope, keturunan langsung Dinasti Nope) yang diwawancarai pada 18 Mei 2026 di Niki-Niki. Informan utama kedua adalah Gerson Lobis Nope (59 tahun, anak dari istri ketiga Raja Kusa Nope dari marga Nitbani, keturunan langsung Raja Kusa Nope) yang diwawancarai pada 25 Mei 2026 di Niki-Niki. Observasi lapangan juga dilakukan pada 18-19 Mei 2026 untuk memverifikasi bukti material seperti kompleks *Sonaf*, makam-makam kerajaan, dan situs *Ie'u* Tunbes.

Sumber sekunder meliputi naskah akademik Hans Hägerdal (2025) yang berbasis arsip kolonial Belanda dan Portugis, *Algemeine Memorie van het landschap Amanoebang* oleh J. Venema (1916), silsilah tak diterbitkan oleh P.G. Spillett (1999), catatan kolonial L.J. van Dijk dalam *Landschappen op Timor en Onderhoorigheden* (1925 & 1934), serta dokumen silsilah "AMANUBAN" (anonim, n.d.) yang diperoleh dari keluarga kerajaan, karya M.S. Kartadarmadja (1972), dan publikasi Pemerintah Kabupaten TTS (2003).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis historis dengan tahapan sebagai berikut. *Pertama*, heuristik yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. *Kedua*, kritik sumber yang terbagi menjadi kritik eksternal (pemeriksaan fisik dokumen) dan kritik internal (penilaian reliabilitas isi sumber dengan *cross-check* antar informan dan antar sumber tertulis). *Ketiga*, interpretasi yaitu proses penafsiran dan analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi dengan menggunakan teori kepemimpinan Weber (1978) dan Burns (2010). *Keempat*, historiografi yaitu penulisan naratif kronologis-tematik yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan ilmiah (Gottschalk, 1986; Sjamsuddin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah bekas Kerajaan Amanuban secara administratif saat ini termasuk dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat antara 9°30' - 10°00' Lintang Selatan dan 124°00' - 124°45' Bujur Timur. Topografi wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 300 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis yang bergelombang ini membentuk karakteristik masyarakat agraris yang menggantungkan hidup pada pertanian ladang dan peternakan, dengan komoditas utama jagung, padi ladang, dan ternak sapi (Hägerdal, 2025; Sipa, 2024).

Kelurahan Niki-Niki merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Amanuban sejak masa pemerintahan Raja Pae Nope (1920-1946) dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Kusa Nope (1949-1962). Berdasarkan observasi peneliti (18-19 Mei 2026), Niki-Niki terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, berjarak sekitar 10 kilometer dari Kota Soe ke arah timur, dengan ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Di kelurahan ini terdapat kompleks *Sonaf* (Istana) Kerajaan yang dibangun pada masa Raja Pae Nope sekitar tahun 1930-an, dengan arsitektur yang mencerminkan akulturasi antara gaya bangunan tradisional Timor dengan pengaruh kolonial Belanda. Selain *Sonaf*, di Niki-Niki juga terdapat makam para raja Amanuban, termasuk makam Raja Kusa Nope yang terletak di kompleks pemakaman keluarga kerajaan tidak jauh dari istana.

Desa Tunbes merupakan situs keramat (*le'u*) bagi Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, berjarak sekitar 5 kilometer dari Niki-Niki ke arah selatan. Berdasarkan observasi peneliti (18 Mei 2026), Tunbes memiliki makna spiritual yang sangat penting karena di desa inilah terdapat makam empat raja pertama Dinasti Nope yang merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Amanuban. Pemaknaan terhadap Tunbes sebagai situs keramat menjadi aspek penting dalam memahami legitimasi kekuasaan tradisional di Kerajaan Amanuban, karena legitimasi para raja tidak semata-mata berasal dari kekuasaan politis, tetapi juga dari hubungan spiritual dengan leluhur yang dimakamkan di Tunbes (Koentjaraningrat, 2009). Hal ini sejalan dengan konsep otoritas tradisional yang dikemukakan oleh Weber (1978), di mana legitimasi kekuasaan diperoleh melalui kepercayaan terhadap kesakralan tradisi yang berlaku turun-temurun.

Silsilah Dinasti Nope dan Posisi Kusa Nope

Berdasarkan sumber Venema (1916), Spillett (1999), van Dijk (1925 & 1934), Hägerdal (2025), serta dokumen silsilah keluarga "AMANUBAN" (anonim, n.d.), berikut adalah silsilah para penguasa Kerajaan Amanuban yang telah disintesis. Dokumen "AMANUBAN" mencantumkan urutan: Alak Mali – Albanu Nope – Tu Nope – Bil Banu Nope – Seo Bil Nope – Don Michel – Don Louis – Jacobus Albertus (Kobis) – Tubani – Louis Nope – Baki Nope – Sanu Nope – Bil Nope (Suafa Leu) – Pae Nope – Kusa Nope. Silsilah ini menunjukkan bahwa Dinasti Nope telah berkuasa di Amanuban sejak abad ke-17 atau ke-18.

Tabel 1. Silsilah Penguasa Kerajaan Amanuban (Abad ke-18 hingga 1962)

No	Nama Raja	Periode Pemerintahan	Keterangan
1	Alak Mali	~	Leluhur awal (dokumen "AMANUBAN")
2	Albanu Nope	~	~
3	Tu Nope	~	~
4	Bil Banu Nope	Sebelum 1736	Cikal bakal Dinasti Nope
5	Seo Bil Nope	~	~
6	Don Michel	sebelum 1749-1751	Penguasa pertama dalam arsip kolonial
7	Don Louis	1751-1770	Saudara Don Michel
8	Don Jacobus Albertus (Kobis)	1770-1786	Putra Don Louis
9	Tubani	1786-sebelum 1808	Menurut Venema (1916)
10	Louis Nope	sebelum 1808-c.1830	Putra Tubani
11	Baki Nope	c.1830-1882	Putra Louis Nope

12	Sanu Nope	1862-1879	Putra Baki Nope
13	Bil Nope (Suafa Leu / Koko Sufa Leu)	1883-1910	Gugur melawan Belanda
14	Pae Nope	1920-1946	Putra Noni Nope
15	Paulus Nope (Pemangku)	1946-1949	Putra sulung Pae Nope
16	Kusa Nope	14 Juli 1949-1962	Putra Pae Nope dari selir Bi Kohe Nitibani, wafat 1979

Sumber: Diolah dari dokumen "AMANUBAN" (anonim, n.d.); Venema (1916); Spillett (1999); van Dijk (1925 & 1934); Hägerdal (2025: 7-8, 23-25); wawancara Pina Ope Nope (2026); wawancara Gerson Lobis Nope (2026).

Berdasarkan wawancara dengan Pina Ope Nope (18 Mei 2026), Raja Pae Nope memiliki sembilan orang istri, di mana narasumber sendiri merupakan cucu dari istri kedua. Gerson Lobis Nope (wawancara, 25 Mei 2026) mengkonfirmasi bahwa Pae Nope memiliki banyak istri, dan Kusa Nope adalah putra dari selir. Informasi ini menunjukkan dinamika suksesi yang kompleks di lingkungan istana Kerajaan Amanuban.

Biografi dan Keluarga Raja Kusa Nope

Berdasarkan wawancara dengan Gerson Lobis Nope (25 Mei 2026), yang merupakan anak dari istri ketiga Raja Kusa Nope dari marga Nitbani, diperoleh data biografis sebagai berikut: Gerson Lobis Nope menjelaskan bahwa Raja Kusa Nope lahir pada tahun 1922 dan wafat pada tanggal 27 Februari 1980. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman para raja di Niki-Niki, berdampingan dengan para pendahulunya dari Dinasti Nope. Dokumen silsilah "AMANUBAN" mencatat tahun wafat Kusa Nope sebagai 1979, sehingga terdapat perbedaan kecil antara sumber tertulis dan sumber lisan (wawancara, Gerson Lobis Nope, 25 Mei 2026).

Mengenai struktur keluarga, Gerson Lobis Nope menjelaskan bahwa Raja Kusa Nope memiliki tiga orang istri. Dari ketiga istri tersebut, Kusa Nope memiliki tiga sonaf (istana/kediaman) yang berbeda, yaitu:

No	Nama Sonaf	Lokasi
1	Sonaf Sonbesi	Niki-Niki
2	Sonaf Ayo	Niki-Niki
3	Sonaf Tae Hue	Soe

Narasumber sendiri merupakan anak dari istri ketiga Raja Kusa Nope. Informasi ini menunjukkan struktur kekerabatan yang kompleks dalam keluarga besar Dinasti Nope dan mengonfirmasi bahwa Kusa Nope, seperti halnya ayahnya (Raja Pae Nope), juga memiliki banyak istri yang ditempatkan di kediaman yang berbeda (wawancara, Gerson Lobis Nope, 25 Mei 2026).

Latar Belakang Pengangkatan Kusa Nope

Pengangkatan Kusa Nope sebagai penguasa tertinggi Kerajaan Amanuban tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks suksesi dinasti Nope yang berlangsung dalam masa transisi dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber historis yang berhasil dihimpun, terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi pengangkatan Kusa Nope.

Pertama, krisis kepemimpinan pasca mundurnya Raja Pae Nope. Menurut catatan Hägerdal (2025: 23-24), selama Perang Dunia II, Pae Nope mengambil sikap kontroversial dengan menghancurkan potret Ratu Wilhelmina di hadapan 15 saksi mata setelah kekalahan Belanda-Australia pada tahun 1942, meminta otoritas Jepang di Soe untuk melenyapkan Kekristenan di wilayah tersebut, serta diduga menyediakan perempuan lokal untuk tentara Jepang (*comfort women*). Setelah Sekutu kembali pada tahun 1945, Pae Nope menyadari masa depannya suram dan mengundurkan diri pada tahun 1946, secara formal karena gangguan kesehatan mental tetapi alasan lain yang lebih mendasar adalah kekhawatirannya terhadap konsekuensi hukum.

Kedua, memburuknya kesehatan Paulus Nope. Setelah pengunduran diri Pae Nope, Paulus Nope (putra sulung) ditunjuk sebagai pemangku raja (*Kartikel pertama*). Namun, pada tahun 1949, kondisi kesehatannya terus memburuk. Hägerdal (2025: 25) mencatat secara spesifik:

"*Since Paulus Nope's health was failing, the Dutch controleur decided to make his half-brother Kusa Nope acting ruler in his stead. Kusa had recently finished school in Makassar and was put in charge in 1949."

Ketiga, kapasitas personal yang ditunjang oleh latar belakang pendidikan modern. Gerson Lobis Nope (wawancara, 25 Mei 2026) menjelaskan bahwa Kusa Nope mengikuti pendidikan ilmu pemerintahan di Makassar. Program pendidikan ini secara khusus diperuntukkan bagi kaum bangsawan atau keturunan raja dan diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin tradisional yang melek administrasi modern dan mampu berinteraksi dengan birokrasi kolonial. Kusa Nope baru saja menyelesaikan sekolahnya di Makassar sebelum diangkat sebagai pemangku raja pada tanggal 14 Juli 1949.



Gambar 1. Kompleks Sonaf (Istana) Kerajaan Amanuban di Niki-Niki.

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti (2026)

Strategi Kepemimpinan Kusa Nope (1950-1958)

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada bulan Desember 1949 dan pembubaran Republik Indonesia Serikat pada bulan Agustus 1950, status Kerajaan Amanuban sebagai *zelfbestuur* (swapraja) dalam kerangka Hindia Belanda secara resmi berakhir. Namun demikian, dalam masa transisi awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih mengakui eksistensi kerajaan-kerajaan swapraja. Kusa Nope dikonfirmasi posisinya oleh pemerintah Republik Indonesia dengan gelar Kepala Daerah Swapraja (KDS Amanuban) (Hägerdal, 2025: 25).

Penelitian ini menemukan empat strategi utama yang dikembangkan Kusa Nope untuk mempertahankan legitimasinya pada periode 1950-1958.

Strategi pertama adalah adaptasi struktural tanpa konfrontasi. Kusa Nope menerima status baru sebagai Kepala Daerah Swapraja tanpa melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Langkah ini secara signifikan berbeda dengan sikap pamannya, Bil Nope (Hau Sufa Le'u), yang memilih perlawanan fisik terhadap kolonial Belanda dan gugur dalam kobaran api istananya pada Oktober 1910. Hägerdal (2025: 19-20) mengutip pernyataan Bil Nope sebelum pertempuran terakhir: "*It is better for us to die than to stay in the hands of the Company like dogs and pigs. Let us fight until we die!*" Kusa Nope menyadari bahwa konteks politik pada pertengahan abad ke-20 telah berubah secara fundamental: yang dihadapi bukan lagi kekuatan kolonial asing, melainkan negara-bangsa merdeka yang mengklaim legitimasi atas dasar kedaulatan rakyat. Gerson Lobis Nope (wawancara, 25 Mei 2026) menambahkan bahwa Kusa Nope telah mengikuti gaya kepemimpinan modern dan pada masa sebelum menjadi bupati (ketika masih menjabat sebagai raja), ia belum mengambil kebijakan *paronisasi* dan *lamtoronisasi* kepada rakyat, seiring dengan tuntutan zaman dan transisi menuju sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Strategi kedua adalah pemanfaatan latar belakang pendidikan modern. Berbeda dengan raja-raja tradisional sebelumnya yang lebih mengandalkan otoritas kharismatik dan tradisional, Kusa Nope memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan birokrasi modern karena penguasaannya terhadap sistem administrasi yang diperoleh dari pendidikannya di Makassar. Gerson Lobis Nope (wawancara, 25 Mei 2026) menjelaskan bahwa pendidikan di Makassar ini khusus diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan diselenggarakan oleh Belanda. Penelitian Ollo (2015) tentang Raja Pae Nope menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, modernisasi infrastruktur dan administrasi telah dimulai. Kusa Nope melanjutkan dan memperdalam proses modernisasi ini dengan memanfaatkan kapasitas administratifnya, sehingga ia tidak hanya dihormati sebagai pewaris tahta secara genealogis, tetapi juga diakui sebagai administrator yang kompeten oleh pemerintah pusat.

Strategi ketiga adalah membangun jejaring politik hingga tingkat nasional. Gerson Lobis Nope (wawancara, 25 Mei 2026) mengkonfirmasi bahwa pada tahun 1955, Kusa Nope menjadi anggota Konstituante (lembaga penyusun undang-undang) sebagai perwakilan dari wilayah Timor. Ia juga berperan sebagai salah satu penggagas pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 1958 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 Tahun 1958 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958. Jejaring politik ini memberinya modal sosial dan politik yang sangat berharga dalam mempertahankan eksistensi Kerajaan Amanuban di tengah arus sentralisasi dan modernisasi negara.

Strategi keempat adalah penghibahan tanah kerajaan kepada pemerintah. Gerson Lobis Nope (wawancara, 25 Mei 2026) mengungkapkan kebijakan monumental Kusa Nope: setelah menjadi raja dan sebagai bupati, Kusa Nope menghibahkan banyak tempat atau daerah milik kerajaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah Republik Indonesia. Tanah-tanah yang merupakan milik Kerajaan Amanuban tersebut dihibahkan menjadi milik negara dan masuk ke dalam administrasi pemerintahan yang modern. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kusa Nope untuk tidak mempertahankan struktur feodal, melainkan mendorong integrasi wilayah kerajaan ke dalam sistem pemerintahan yang lebih rasional dan terstruktur sesuai dengan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan strategi adaptasi yang dikembangkan Kusa Nope memungkinkannya untuk tetap memegang posisi Kepala Daerah Swapraja Amanuban hingga penghapusan sistem kerajaan secara nasional pada tahun 1962. Hägerdal (2025: 25) mencatat dengan definitif: "*By 1962 the kerajaan system was abrogated by the Indonesian authorities.*" Penghapusan ini merupakan bagian dari kebijakan penyatuan administrasi dan modernisasi pemerintahan daerah yang konsisten dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan, dimulai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 1950, kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, dan Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 yang secara bertahap menghapus status swapraja di berbagai daerah. Meskipun posisi formalnya sebagai kepala daerah swapraja berakhir pada tahun 1962, jejak kepemimpinan Kusa Nope tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Amanuban. Ia wafat pada tahun 1979 (dokumen silsilah "AMANUBAN") atau menurut sumber lisan 27 Februari 1980 (wawancara Gerson Lobis Nope, 2026) dan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga kerajaan di Niki-Niki, di mana makamnya hingga kini diziarahi oleh keturunan keluarga kerajaan dan masyarakat yang menghormatinya sebagai salah satu raja terakhir yang memimpin Amanuban dalam periode transisi dari kolonial menuju kemerdekaan (Observasi lapangan, 18 Mei 2026; wawancara Gerson Lobis Nope, 2026).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Prager (1993) bahwa elite lokal di negara-negara pascakolonial menghadapi dilema ganda antara mempertahankan legitimasi tradisional dan beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern. Strategi Kusa Nope yang tidak melakukan perlawanan fisik menunjukkan pergeseran paradigma dari konfrontasi ke negosiasi, berbeda dengan sikap heroik namun tragis Bil Nope pada tahun 1910.

Jika dibandingkan dengan temuan Ollo (2015) tentang Raja Pae Nope yang fokus pada modernisasi infrastruktur fisik (pembangunan *sonaf*, kantor bersama, jalur transportasi), maka

Kusa Nope melakukan jenis modernisasi yang berbeda: modernisasi institusional dan relasional. Ia tidak membangun gedung, tetapi membangun hubungan dan mengubah cara kerja pemerintahan, sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional Burns (2010). Kusa Nope menunjukkan kemampuan membawa perubahan melalui *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual) dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam sistem modern tanpa menghilangkan esensi keduanya.

Penelitian ini juga mengonfirmasi konsep "diplomasi kultural" Fox (2003) dalam konteks kerajaan-kerajaan di Timor. Kusa Nope berhasil memanfaatkan simbol-simbol adat (statusnya sebagai *usif/raja*) untuk memperkuat posisinya di mata masyarakat, sementara di hadapan pemerintah pusat ia tampil sebagai birokrat modern yang terdidik dan loyal. Kemampuannya membaca konstelasi politik nasional—terutama kebijakan penghapusan swapraja—dan meresponsnya dengan menjadi bagian dari sistem (bukan melawannya) serta menghibahkan tanah kerajaan kepada negara merupakan faktor kunci keberhasilannya.

Berdasarkan uraian di atas, strategi kepemimpinan Kusa Nope dapat disintesis ke dalam sebuah model yang oleh peneliti sebut sebagai "Adaptasi Diplomatis Elit Tradisional" (*Diplomatic Adaptation of Traditional Elite*). Model ini memiliki lima karakteristik utama: (1) fleksibilitas identitas (navigasi status ganda sebagai raja tradisional dan birokrat modern), (2) pemanfaatan modal pendidikan (sekolah di Makassar untuk legitimasi rasional), (3) kontinuitas tanpa konfrontasi (negosiasi dan adaptasi struktural, bukan perlawanan fisik), (4) jejaring politik lintas skala (lokal, regional Makassar, nasional Jakarta), dan (5) transformasi legitimasi (dari otoritas tradisional murni menuju kombinasi otoritas tradisional, kharismatik, dan legal-rasional).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: (1) Latar belakang pengangkatan Kusa Nope sebagai penguasa Kerajaan Amanuban pada tanggal 14 Juli 1949 adalah krisis legitimasi akibat pengunduran diri Raja Pae Nope (1946) karena perilaku kontroversialnya selama pendudukan Jepang, memburuknya kesehatan pemangku raja Paulus Nope, serta kebutuhan akan pemimpin yang terdidik secara modern di era transisi dari kolonial menuju kemerdekaan. Kusa Nope lahir pada tahun 1922, memiliki tiga istri dengan tiga *sonaf* (Sonbesi, Ayo di Niki-Niki, dan Tae Hue di Soe), dan wafat pada tahun 1979 (menurut sumber lisan 27 Februari 1980). (2) Strategi Raja Kusa Nope dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan tradisional pada periode 1950-1958 adalah "Adaptasi Diplomatis Elit Tradisional" yang meliputi adaptasi struktural tanpa konfrontasi (menerima status Kepala Daerah Swapraja), pemanfaatan latar belakang pendidikan modern (sekolah ilmu pemerintahan di Makassar khusus bangsawan oleh Belanda) untuk membangun legitimasi rasional, pembangunan jejaring politik hingga tingkat nasional (anggota Konstituante 1955 dan penggagas pembentukan Provinsi NTT), serta penghibahan tanah kerajaan kepada pemerintah untuk integrasi ke dalam administrasi modern. Model kepemimpinan ini berhasil menjaga stabilitas Kerajaan Amanuban di tengah tekanan modernisasi hingga penghapusan sistem swapraja pada tahun 1962.

Saran bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menetapkan kompleks *Sonaf* Niki-Niki (termasuk *Sonaf* Sonbesi dan *Sonaf* Sing Ayo) serta situs Tunbes sebagai cagar budaya yang dilindungi dan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah. Bagi generasi muda Amanuban, nilai-nilai kepemimpinan adaptif Kusa Nope yang menghormati tradisi namun terbuka terhadap perubahan dapat dijadikan teladan. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif dengan kerajaan swapraja lain di Nusa Tenggara Timur (seperti Mollo atau Amanatun) pada periode yang sama, serta pendalaman arsip-arsip nasional Indonesia dari periode 1950-an yang mungkin belum terjangkau dalam penelitian ini, terutama arsip-arsip tentang proses penghapusan swapraja di Nusa Tenggara Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Drs. Malkisedek Taneo, M.Si dan Sarlota Naema Sipa, S.Pd., M.Hum atas bimbingan dan arahan selama penelitian. Terima kasih juga kepada Pina Ope Nope dan Gerson Lobis Nope yang telah memberikan informasi melalui wawancara terkait sejarah Kerajaan Amanuban. Apresiasi disampaikan kepada Dr. Hans Hägerdal dari

Linnaeus University, Swedia, atas kontribusi naskah akademik sebagai sumber penelitian. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada keluarga besar Dinasti Nope, para tokoh adat di Niki-Niki dan Tunbes, serta semua pihak yang mendukung kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (n.d.). *AMANUBAN*. [Dokumen silsilah keluarga Kerajaan Amanuban, tidak diterbitkan].
- Booth, A. (2015). *The economic history of Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burns, J. M. (2010). *Leadership* (1st Harper Perennial Political Classics ed.). New York: HarperPerennial.
- Feith, H. (1958). *The Wilopo cabinet, 1952-1953: A turning point in post-revolutionary Indonesia*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Fox, J. J. (2003). Dari zaman kerajaan ke zaman republik: Transformasi politik di Timor. Dalam H. G. Schulte Nordholt & G. Abdullah (Ed.), *Indonesia: Mencari demokrasi* (hlm. 45-78). Jakarta: KITLV.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah* (N. Notosusanto, Terj.). Jakarta: UI-Press.
- Hägerdal, H. (2025). *Amanuban*. [Naskah akademik tidak dipublikasikan].
- Katulski, J. (2024). Beyond oral history: The application of semi-structured interviews to research. *Świat Idei I Polityki*, 23(2). <https://doi.org/10.34767/SIIP.2024.02.06>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nope, P. O. (2021). *Usi (Raja) Don Louis Nope II, pejuang Timor yang tidak terkalahkan*. Yogyakarta: Citra Airiz.
- Ollo, O. (2015). Karya dan prestasi Raja Pae Nope di Kerajaan Amanuban tahun 1920-1946. *Jurnal Sejarah*, 3(2), 123-140.
- Prager, J. B. (1993). The political strategy of local elites in transitional societies. *Journal of Political and Military Sociology*, 21(2), 145-168.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Schulte Nordholt, H. G. (1996). *The spell of power: Sejarah politik Bali, 1650-1940*. Leiden: KITLV Press.
- Sipa, S. N. (2024). *Zuid Midden Timor: Pusat pemerintahan Belanda di pedalaman Pulau Timor tahun 1905-1942*. Yogyakarta: Tangguh Denara Jaya.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Spillett, P. G. (1999). *Genealogy of Amanuban*. [Manuskrip tidak diterbitkan].
- van Dijk, L. J. (1925). *Landschappen op Timor en Onderhoorigheden*. 's-Gravenhage: Arsip Kolonial Belanda.
- van Dijk, L. J. (1934). *Landschappen op Timor en Onderhoorigheden* (Edisi revisi). 's-Gravenhage: Arsip Kolonial Belanda.
- Venema, J. (1916). *Algemeine Memorie van het landschap Amanoebang*. KIT 1276, KA-ARA, Den Haag.
- Vickers, A. (2013). *Sejarah Indonesia modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley: University of California Press.
- [Tim Penyusun]. (2003). *Sejarah pemerintahan kabupaten Timor Tengah Selatan*. Kupang: Pemkab TTS.